



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO TAHUN 2021-2026



Jl. Raya Balongbendo, Kupangkepuh,
Wonokupang, Kec. Balongbendo, Kabupaten
Sidoarjo 61263

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan taufiq serta hidayahNya penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo ini merupakan penjabaran daripada visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, dan **H. Subandi, S.H.**, yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo ini merupakan implementasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Selanjutnya, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahunan di Kecamatan Balongbendo.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo ini, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk meningkatkan kesempurnaan penyusunan Renstra ini pada periode mendatang.

Camat Balongbendo,



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

NIP. 19790114 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Balongbendo.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balongbendo.....	37
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 42
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongbendo	42
2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.1 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Sidoarjo.....	48
2.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	52
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 56

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balongbendo.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan	20
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Jabatan.....	20
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.4	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.5	Daftar Aset Kecamatan Balongbendo	24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020	32
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Balongbendo Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongbendo.....	42
Tabel 3.2	Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo.....	45
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	47
Tabel 3.4	Analisis Terhadap Visi-Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.....	48
Tabel 3.5	Telaah RTRW Kecamatan Balongbendo.....	50
Tabel 3.6	Analisis Lingkungan Strategis Kantor Kecamatan Balongbendo	53
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balongbendo.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balongbendo	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo	61

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71
Tabel 7.2	Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Balongbendo Yang Menacu Pada RPJMD	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo.....	12
-----------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Realisasi Permohonan Kartu Keluarga Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	33
Grafik 2.2	Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo Bidang Perekaman dan Pencetakan E-KTP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu suksesi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan juga merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting, baik dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan. Alasannya adalah karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target pembangunan yang dimaksud.

Oleh karena itu, apabila perencanaan pembangunan dirancang dengan sedemikian baik, serta diikuti oleh pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Maka akan dapat kebijakan yang dihasilkan juga akan menghasilkan implikasi yang jauh lebih baik. Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat". Oleh karena itu, Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang

membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll). Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Sementara untuk dapat mewujudkan keterpaduan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa kecamatan sebagai bagian dari salah satu Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Hal itu telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

11. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Persetujuan Perda Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor S Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kantor Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis Lokal, Regional, Nasional dan Global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah untuk :

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026 kedalam Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
4. Menentukan strategi untuk Pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALONGBENDO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Balongbendo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balongbendo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BALONGBENDO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongbendo
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo

Balongbendo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada di ujung barat Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Balongbendo memiliki luas wilayah 755 Ha, 81,662 penduduk dengan 41,134 orang laki-laki dan 40,528 orang perempuan. Kecamatan Balongbendo terdiri dari 20 desa/kelurahan dengan 88 Rukun Warga (RW) dan 350 Rukun Tetangga (RT). Berikut ini adalah daftar nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Balongbendo.

1. Singkalan
2. Kedung Sukodani
3. Bakung Temenggungan
4. Sumokembangsri
5. Seduri
6. Wonokupang
7. Waruberon
8. Bakalan Wringinpitu
9. Gagang Kepuhsari
10. Suwaluh
11. Watesari
12. Seketi
13. Kemangsen
14. Jabaran
15. Balongbendo
16. Jeruk Legi
17. Penambangan
18. Wonokarang
19. Bakung Pringgodani
20. Bogempinggir

Kecamatan Balongbendo Dalam bidang pendidikan sudah memiliki sarana pendidikan mulai dari Kelompok Bermain, TK, sampai SMA. Dalam bidang Kesehatan memiliki beberapa fasilitas diantaranya Puskesmas rawat inap dan Puskesmas pembantu yang tersebar diseluruh desa. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Aparatur Kecamatan Balongbendo melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, yang dalam menjalankan tugas Pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Forkopimka Kecamatan Balongbendo serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMDP3AKB, Dinas P3, Badan Statistik, UPTD Puskesmas dan Sekolah baik Negeri maupun Swasta. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 5 Kasi, 2 Kasubag, Staf dan 23 Kepala Desa.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun hal itu bukan berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Keberadaan Kantor Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah.

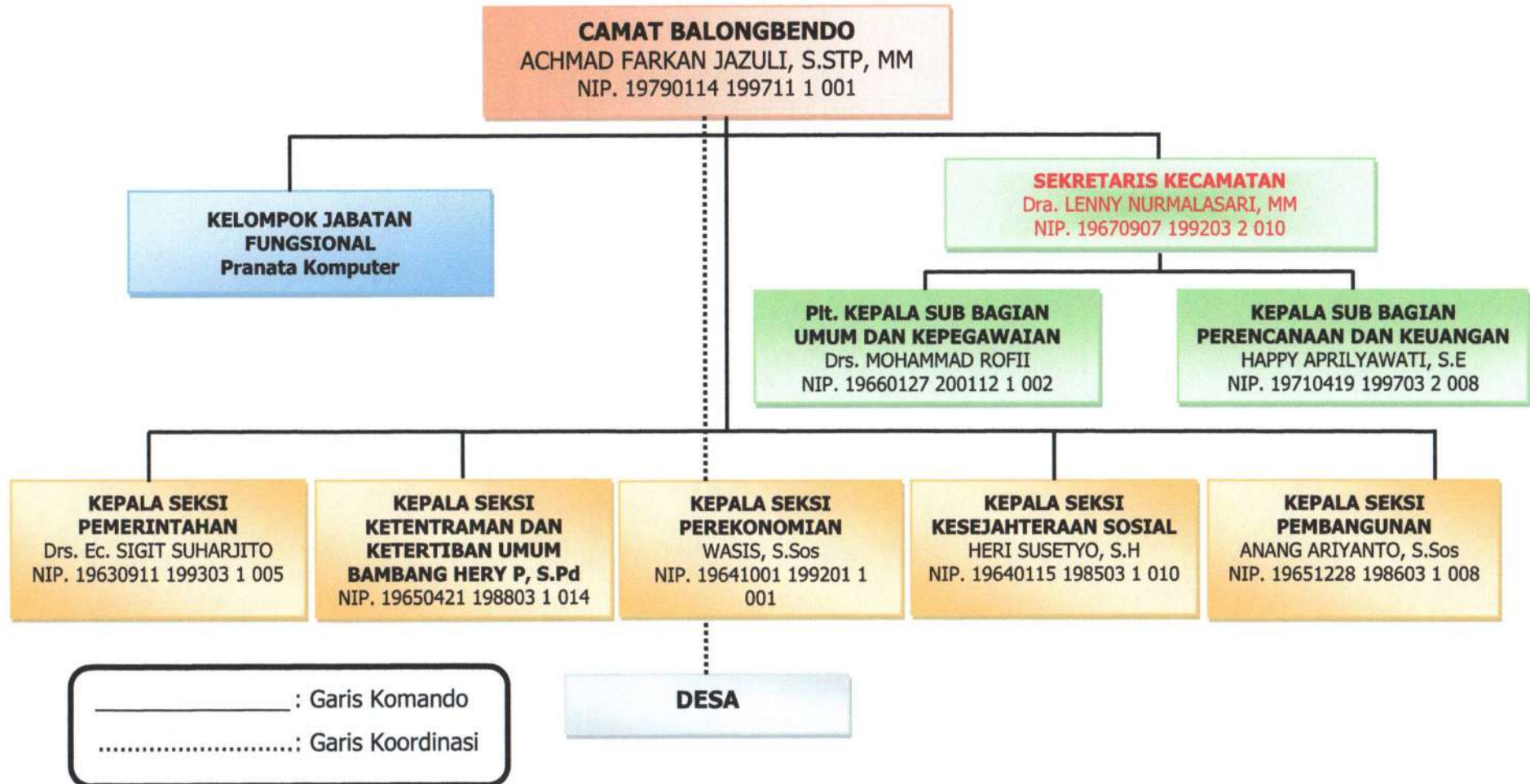
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Maka berikut ini kami sajikan mengenai struktur, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana, Seksi-seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Perekonomian;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Seksi Pembangunan;
- d. Unsur Kewilayahan: Kelurahan;
 - 1. Unsur Pimpinan : Lurah;
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan :
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Pembangunan;
 - d) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo



Selanjutnya, berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi daripada struktur Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat berwenang menandatangani :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
 - b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - c. legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
 - d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
 - e. rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
 - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

3. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;

2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/reklame liar);
 4. Penanganan konflik sosial;
- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:

1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

9. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 1. Pembinaan penanganan sampah domestik;
 2. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;

- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

10. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan dan membantu satuan kerja terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Balongbendo

1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balongbendo didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran.

Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Balongbendo adalah sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Golongan

No .	Uraian	Golongan								Jumlah
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat		-	1	1	8	2	-	-	12
3	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	1
4	Seksi Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Seksi Kesos	-	-	-	1	1	-	-	-	2
6	Seksi Trantib	-	-	1	-	5	-	-	-	6
7	Seksi Perekonomian	-	-	-	1	2	-	-	-	3
	JUMLAH	1	-	2	4	17	2	-	-	26

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diatas, Sekretariat menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan OPD di Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Jumlah pegawai di kantor Kecamatan Balongbendo sebanyak 26 orang dengan rincian:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo
Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	L	P	Jumlah
1	Pejabat Struktural	5	1	6
2	Staf	15	4	19
3	Tenaga Teknis/Fungsional	-	1	1
	Jumlah	20	6	26

Kondisi kepegawaian Kecamatan Balongbendo berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2 yang menunjukkan bahwa Kecamatan Balongbendo memiliki Pegawai laki-laki sebanyak 20 orang dan 6 orang pegawai perempuan.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan :

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo apabila dilihat berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo
Berdasarkan Golongan

No	Uraian	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	1	-	1
2	Golongan III	3	3	6
3	Golongan II	16	3	19
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		20	6	26

Kondisi kepegawaian Kecamatan Balongbendo berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3 kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat golongannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.3 tingkat pendidikan karyawan Kecamatan Balongbendo yang paling banyak adalah golongan 2. Secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo jika dilihat dari tingkat lulusan pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Balongbendo
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	L	P	Jumlah
1	Pasca Sarjana	1	-	1
2	Sarjana	4	2	6
3	Diploma	1	2	3
4	SLTA	13	3	16
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		19	7	26

Berdasarkan data yang ditampilkan Tabel 2.4 diatas, kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Balongbendo didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat. Secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum. Jumlah Karyawan yang menamatkan Pendidikan S1 adalah 6 (enam) orang dan karyawan yang menamatkan pendidikan tingkat diploma berjumlah 3 (tiga) orang. Hal ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo.

Maka dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kecamatan Balongbendo dirasa cukup untuk menunjang berjalannya roda pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan secara efektif dan efisien, nyaman dan aman. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu diupayakan untuk dipenuhi. karena apabila sarana prasarana yang lebih memadai maka akan dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu *output* atau tingkat capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Balongbendo karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Balongbendo telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

1. Tanah seluas 623 M2.
2. Pendopo Kecamatan.
3. Gedung Kantor Kecamatan Balongbendo. Untuk Bangunan Ruang Kasi sebelah selatan kondisi rusak berat. Sedangkan usulan penghapusan sudah dilakukan pengajuan ke BPKAD selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
4. Gedung Serbaguna (Ruang Rapat) Kecamatan Balongbendo.
5. Rumah Dinas Camat.
6. Mushola.
7. Bangunan yang disewakan untuk Bank Jatim.
8. Kendaraan Operasional (Mobil Patroli Satpol PP, Izuzu Phanther. Mini Dumptruck Carry, Roda Tiga Viar) sebanyak 4 Unit, tetapi untuk operasional Sekretariat (Phanther) kondisi rusak dan untuk pemeliharaan memerlukan biaya besar.

9. Kendaraan Operasional Camat (Toyota Rush) dan Sekcam (Daihatsu Terios).
10. Kendraaan Operasional Roda Dua sebanyak 9 Unit.
11. Sarpras Paten terdiri dari Kursi Tunggu Ruang Pelayanan, Ruang Laktasi, Pojok Baca, Area Parkir, Mesin Antrian, Televisi, AC, Komputer, Scanner, Printer, Printer E-KTP, Papan Pengumuman, Jaringan Internet dan Jaringan SIAK. Beberapa sarpras dianggarkan di Tahun 2020. Sarpras Paten yang belum dicukupi yaitu Kursi Roda dan fasilitas disabilitas. Akan dianggarkan di Tahun 2021.
12. Sarpras Aparatur sudah mencukupi. Hanya diperlukan pendataan berdasarkan kondisi dan kebutuhan personil. Akan dilakukan rekonsiliasi dengan Pengurus Pengguna Barang dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
13. Gudang. Kendala yang dihadapi yaitu Gudang Barang Rusak yang tidak layak, sedangkan barang yang dihapus memerlukan proses penghapusan di BPKAD.

Adapun rincian tentang Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dapat dilihat dalam tabel beriku ini.

Tabel 2.5
Daftar Aset Kecamatan Balongbendo

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Tanah	1979	1	616.000.000	616.000.000
2	Station Wagon	1997	1	60.000.000	60.000.000
3	Station Wagon	2007	1	129.500.000	129.500.000
4	Station Wagon	2014	1	230.430.000	230.430.000
5	Pick Up	2014	1	188.627.222	188.627.222
6	Sepeda Motor	2004	1	9.140.000	9.140.000
7	Sepeda Motor	2013	3	15.083.000	45.249.000
8	Sepeda Motor	2014	2	13.972.384	27.944.768

9	Sepeda Motor	2014	3	13.880.000	41.640.000
10	Sepeda Motor	2014	1	21.453.850	21.453.850
11	Timbangan	2014	1	900.000	900.000
12	Mesin Ketik	2013	1	2.500.000	2.500.000
13	Mesin Absen	2009	1	16.417.500	16.417.500
14	Mesin Absen	2015	1	7.500.000	7.500.000
15	Mesin Absen	2016	1	4.480.000	4.480.000
16	Mesin Fotocopy Folio	2013	1	9.500.000	9.500.000
17	Lemari Besi/metal	2003	1	2.450.000	2.450.000
18	Lemari Besi/metal	2018	1	72.665.000	72.665.000
19	Lemari Besi/metal	2018	1	61.665.000	61.665.000
20	Lemari Besi/metal	2018	1	50.665.000	50.665.000
21	Lemari Kayu	1983	1	150.000	150.000
22	Lemari Kayu	2012	1	7.500.000	7.500.000
23	Lemari Kayu	2018	4	2.700.000	10.800.000
24	Rak Besi	2016	4	2.000.000	8.000.000
25	Rak Besi	2015	2	2.000.000	4.000.000
26	Rak Kayu	2012	1	500.000	500.000
27	Rak Kayu	2013	2	2.500.000	5.000.000
28	Rak Kayu	2018	1	4.950.000	4.950.000
29	Filing Cabinet Besi	2011	2	2.000.000	4.000.000
30	Filing Cabinet Besi	2014	3	2.000.000	6.000.000
31	Filing Cabinet Besi	2016	4	2.250.000	9.000.000
32	Lemari Katalog	2013	1	5.000.000	5.000.000
33	Lemari Kaca	2010	1	2.500.000	2.500.000
34	Lemari Kaca	2012	3	2.500.000	7.500.000
35	Lemari Kaca	2009	1	2.000.000	2.000.000
36	Lemari Kaca	2014	4	2.500.000	10.000.000
37	Lemari Kaca	2015	4	2.450.000	9.800.000
38	Lemari Kaca	2015	1	9.410.000	9.410.000
39	Lemari Kaca	2016	3	2.950.000	8.850.000
40	Lemari Kaca	2016	2	3.150.000	6.300.000
41	Lemari Kaca	2010	1	3.600.000	3.600.000
42	Lemari Kaca	2011	4	2.500.000	10.000.000
43	Lemari Kaca	2019	1	22.612.389	22.612.389
44	Lainnya	1986	1	25.000	25.000
45	Running Text	2016	1	14.960.000	14.960.000
46	Alat Penghancur	2011	1	2.000.000	2.000.000

	Kertas				
47	Alat Penghancur Kertas	2016	1	3.420.000	3.420.000
48	Mesin Absensi	2016	1	28.900.000	28.900.000
49	LCD <i>Projector</i>	2019	1	9.959.000	9.959.000
50	Kotak Surat	2016	1	2.000.000	2.000.000
51	Kotak Surat	2016	1	2.000.000	2.000.000
52	Mesin Antrian	2013	1	6.000.000	6.000.000
53	Mesin Antrian	2016	1	45.685.000	45.685.000
54	Papan Nama Instansi	2014	1	7.500.000	7.500.000
55	Papan Pengumuman	2015	1	1.500.000	1.500.000
56	UPS	2011	1	690.000	690.000
57	Rak Koran	2016	1	2.000.000	2.000.000
58	Rak TV	2012	1	500.000	500.000
59	UPS	2016	1	7.480.000	7.480.000
60	UPS	2012	4	800.000	3.200.000
61	Peralatan jaringan	2011	1	957.000	957.000
62	Meja Kerja Kayu	1996	1	500.000	500.000
63	Meja Kerja Kayu	2013	7	1.114.285	7.799.995
64	Kursi Besi/metal	2019	1	4.500.000	4.500.000
65	Meja Rapat	2014	1	11.475.000	11.475.000
66	Tempat Tidur Besi	2014	1	4.000.000	4.000.000
67	Meja Podium	2010	1	4.600.000	4.600.000
68	Meja Podium	2016	1	4.999.500	4.999.500
69	Meja Resepsionis	2019	1	40.150.000	40.150.000
70	Meja Panjang	1987	10	250.000	2.500.000
71	Meja Panjang	2011	1	14.975.000	14.975.000
72	Kursi Rapat	2014	50	350.000	17.500.000
73	Kursi Rapat	2014	15	600.000	9.000.000
74	Kursi Tamu	2012	4	3.000.000	12.000.000
75	Kursi Tamu	2013	2	2.500.000	5.000.000
76	Kursi Tamu	2014	1	2.450.000	2.450.000
77	Kursi Tamu	2014	1	2.400.000	2.400.000
78	Kursi Tamu	2007	1	2.250.000	2.250.000
79	Meja Komputer	1995	1	250.000	250.000
80	Meja Komputer	2003	2	850.000	1.700.000
81	Sofa	2014	1	3.500.000	3.500.000
82	Sofa	2009	1	2.000.000	2.000.000

83	Sofa	2013	2	5.000.000	10.000.000
84	Jam Elektronik	2012	1	4.000.000	4.000.000
85	Mesin Pemotong Rumput	2013	1	2.000.000	2.000.000
86	Mesin Pemotong Rumput	2019	1	2.200.000	2.200.000
87	Pompa Air	2012	1	750.000	750.000
88	Lemari Es	2012	1	2.750.000	2.750.000
89	Lemari Es	2015	1	3.440.000	3.440.000
90	Lemari Es	2015	1	2.200.000	2.200.000
91	Lemari Es	2015	1	2.200.000	2.200.000
92	AC	2018	1	20.900.000	20.900.000
93	AC	2007	1	4.500.000	4.500.000
94	AC	2010	2	3.500.000	7.000.000
95	AC	2011	2	3.500.000	7.000.000
96	AC	2012	2	3.500.000	7.000.000
97	AC	2013	2	3.500.000	7.000.000
98	AC	2014	2	6.500.000	13.000.000
99	AC	2014	2	3.500.000	7.000.000
100	AC	2015	2	3.725.000	7.450.000
101	AC	2015	2	7.770.000	15.540.000
102	AC	2018	1	3.950.000	3.950.000
103	AC	2019	1	6.850.000	6.850.000
104	AC	2013	1	13.410.000	13.410.000
105	AC	2012	1	3.500.000	3.500.000
106	AC	2012	1	3.500.000	3.500.000
107	Korden	2015	1	5.200.000	5.200.000
108	Televisi	2009	1	1.000.000	1.000.000
109	Televisi	2010	1	2.572.000	2.572.000
110	Televisi	2012	2	2.459.000	4.918.000
111	Televisi	2014	1	2.489.000	2.489.000
112	Televisi	2014	1	3.500.000	3.500.000
113	Televisi	2015	1	3.435.000	3.435.000
114	Televisi	2016	2	3.500.000	7.000.000
115	Televisi	2016	1	12.131.200	12.131.200
116	Video Cassette	2013	1	750.000	750.000
117	Unit <i>Power Supply</i>	2014	5	750.000	3.750.000
118	Unit Power Supply	2019	7	735.000	5.145.000

119	Alat Hiasan	2004	1	50.000	50.000
120	Lambang Garuda Pancasila	2004	3	125.000	375.000
121	Gambar Presiden/Wapres	2004	1	50.000	50.000
122	Tangga Aluminium	2012	1	1.500.000	1.500.000
123	Kaca Hias	2014	2	325.000	650.000
124	Dispenser	2013	1	2.500.000	2.500.000
125	Lambang Instansi	2004	1	50.000	50.000
126	Handy Cam	2016	1	4.000.000	4.000.000
127	Vertikal Blind	2018	1	9.760.000	9.760.000
128	Lemari Plastik	2016	1	7.499.800	7.499.800
129	Tripod KTP-el	2018	1	950.000	950.000
130	Alat Potong Kertas	2019	1	1.250.000	1.250.000
131	Mesin Potong Kayu	2019	1	3.200.000	3.200.000
132	Lemari Slang	2015	1	518.000	518.000
133	Meja Kerja	2010	1	4.500.000	4.500.000
134	Meja Kerja	2012	1	3.500.000	3.500.000
135	Meja Kerja	2012	4	2.000.000	8.000.000
136	Meja Kerja	2018	1	2.420.000	2.420.000
137	Meja Kerja	2019	1	2.500.000	2.500.000
138	Meja Kerja	2014	1	1.450.000	1.450.000
139	Meja Kerja	2014	1	1.450.000	1.450.000
140	Meja Tamu Biasa	2016	1	54.730.000	54.730.000
141	Kursi Kerja	2012	1	2.000.000	2.000.000
142	Kursi Kerja	2012	4	1.500.000	6.000.000
143	Kursi Kerja	2013	11	954.546	10.500.006
144	Kursi Kerja	2013	36	235.000	8.460.000
145	Kursi Kerja	2014	10	600.000	6.000.000
146	Kursi Kerja Non Struktural	2015	1	4.935.000	4.935.000
147	Kursi Kerja Non Struktural	2019	1	1.200.000	1.200.000
148	Kotak Saran	2016	1	2.000.000	2.000.000
149	Audio Video Selector (peralatan Studio Audio)	2015	1	4.925.000	4.925.000
150	Audio Visual	2012	1	7.500.000	7.500.000
151	Microphone/boom Stand	2011	4	1.000.000	4.000.000

152	Professional Sound System	2016	1	9.955.000	9.955.000
153	Digital Audio Storage System	2014	1	4.375.000	4.375.000
154	Microphone Cable	2016	4	500.000	2.000.000
155	Camera Electronic	2016	1	7.700.000	7.700.000
156	Camera Electronic	2016	1	7.960.000	7.960.000
157	Slide Projector	2014	1	11.000.000	11.000.000
158	Camera Digital	2010	1	4.800.000	4.800.000
159	Camera Digital	2018	1	11.623.480	11.623.480
160	Lcd Monitor	2010	1	13.175.000	13.175.000
161	Pesawat Telephone	2003	1	30.000	30.000
162	Facsimile	2008	1	1.750.000	1.750.000
163	Facsimile	2008	1	2.290.000	2.290.000
164	Wireless Amplifier	2016	1	50.690.000	50.690.000
165	Layar Proyektor	2016	2	1.900.000	3.800.000
166	P.c Unit	2009	1	10.245.000	10.245.000
167	P.c Unit	2009	1	5.145.000	5.145.000
168	P.c Unit	2009	1	4.480.000	4.480.000
169	P.c Unit	2012	3	7.088.000	21.264.000
170	P.c Unit	2013	1	7.600.000	7.600.000
171	P.c Unit	2014	2	7.000.000	14.000.000
172	P.c Unit	2015	2	7.420.000	14.840.000
173	P.c Unit	2015	1	8.250.000	8.250.000
174	P.c Unit	2016	3	9.950.000	29.850.000
175	P.c Unit	2016	1	20.000.000	20.000.000
176	P.c Unit	2018	4	8.151.500	32.606.000
177	P.c Unit	2018	1	22.850.000	22.850.000
178	P.c Unit	2019	2	9.375.000	18.750.000
179	Lap Top	2007	1	14.850.000	14.850.000
180	Lap Top	2010	1	13.825.000	13.825.000
181	Lap Top	2011	1	14.225.000	14.225.000
182	Lap Top	2011	2	4.500.000	9.000.000
183	Lap Top	2014	1	12.216.000	12.216.000
184	Lap Top	2015	1	12.820.000	12.820.000
185	Lap Top	2015	1	6.380.000	6.380.000
186	Lap Top	2016	1	11.750.000	11.750.000
187	Note Book	2013	1	8.500.000	8.500.000
188	Note Book	2012	1	9.042.250	9.042.250

189	Note Book	2018	1	7.953.000	7.953.000
190	Note Book	2018	1	19.862.383	19.862.383
191	Net Book	2011	1	11.283.650	11.283.650
192	Net Book	2012	3	9.042.250	27.126.750
193	Net Book	2014	3	8.500.000	25.500.000
194	Card Reader KTP-el	2018	1	7.192.068	7.192.068
195	Line Printer	2012	1	68.950.000	68.950.000
196	Hard Disk	2016	1	1.025.000	1.025.000
197	Card Reader KTP-el	2016	1	5.240.000	5.240.000
198	Scanner	2016	1	4.950.000	4.950.000
199	Printer	2010	1	950.000	950.000
200	Printer	2011	1	4.389.000	4.389.000
201	Printer	2012	1	1.100.000	1.100.000
202	Printer	2013	2	6.750.000	13.500.000
203	Printer	2014	3	700.000	2.100.000
204	Printer	2014	2	950.000	1.900.000
205	Printer	2015	2	1.200.000	2.400.000
206	Printer	2015	2	800.000	1.600.000
207	Printer	2015	1	2.950.000	2.950.000
208	Printer	2015	1	618.750	618.750
209	Printer	2016	1	55.750.000	55.750.000
210	Printer	2018	1	49.050.000	49.050.000
211	Printer	2019	4	1.960.800	7.843.200
212	Printer	2019	4	1.375.000	5.500.000
213	Printer	2019	5	2.926.875	14.634.375
214	Scanner	2016	1	4.975.000	4.975.000
215	Finger Print Scanner	2016	1	19.800.000	19.800.000
216	Signature Pad KTP-el	2016	1	12.460.000	12.460.000
217	Finger Print Scanner	2018	1	30.912.000	30.912.000
218	Irish Scanner	2018	1	21.116.983	21.116.983
219	Signature Pad KTP-el	2018	1	14.137.710	14.137.710
220	Scanner	2019	1	5.463.500	5.463.500
221	Koper KTP-el	2018	1	9.900.440	9.900.440
222	Server	2016	1	35.600.000	35.600.000
223	Server	2017	1	149.561.900	149.561.900
224	Server	2016	1	50.600.000	50.600.000

225	Bangunan Kantor	1975	1	4.771.752.705	4.771.752.705
226	Papan Nama Instansi	2018	1	70.647.800	70.647.800
227	Saluran Sekunder Pembuang (bangunan Pembuang Irigasi)	2013	1	50.130.000	50.130.000
228	Penangkal Petir	2016	1	31.580.000	31.580.000
229	Jaringan Listrik	2011	1	2.022.600	2.022.600
230	Jaringan Listrik	2011	1	5.500.000	5.500.000

Sesuai dengan data yang disajikan dalam tabel diatas, secara umum infrastruktur yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo cukup memadai untuk menunjang jalannya tugas dan fungsi Kecamatan Balongbendo dalam melayani kebutuhan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan publik atau masyarakat dilingkungan Kecamatan Balongbendo.

Pada proses ini, Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pada tiap tahunnya. Tingkat capaian kinerja diukur menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pencapaian kinerja Kecamatan Balongbendo 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dapat dilihat pada Tabel berikut :

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

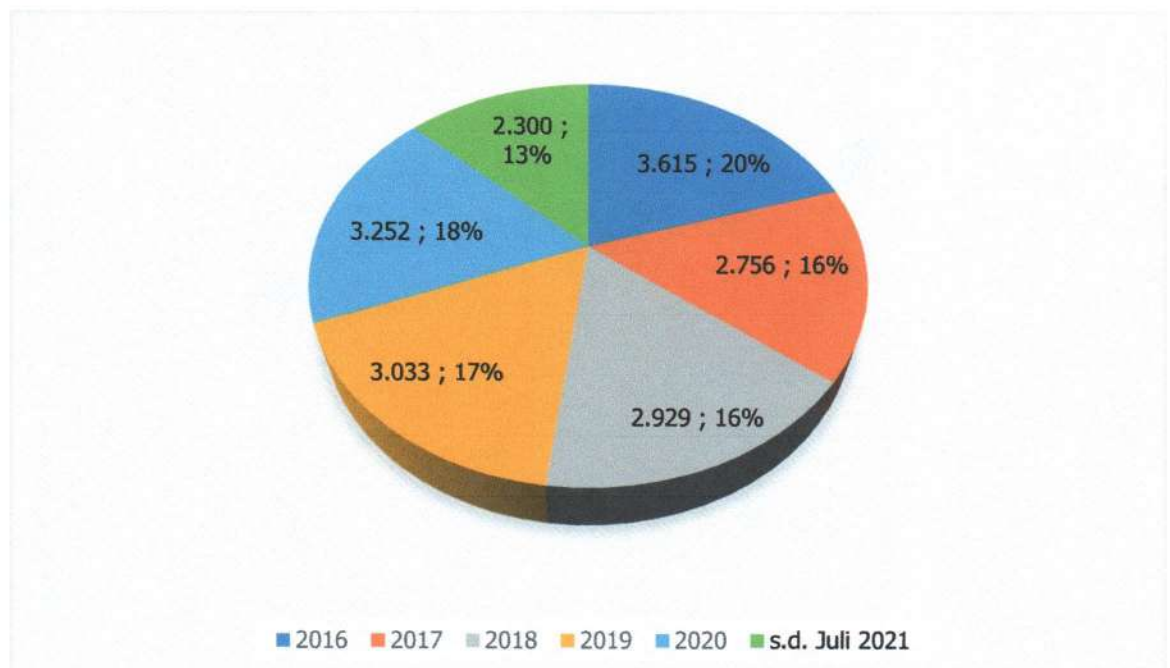
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA- PD Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan				80,00	86,00	86,50	81,00	86,29	84,50	79,79	80,19	85,10	88,05	105,63	92,78	92,71	105,06	102,04
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		
	a. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Balongbendo dilaksanakan dengan baik				N/A	N/A	80,00	86,40	84,00	N/A	N/A	75,00	100,00	90,00	N/A	N/A	93,75	115,74	107,14
	b. Persentase Desa dengan tata Kelola Administrasi Pemerintahan kategori baik							80,00					100,00					125,00	
3	Perentase Desa maju di Kecamatan Balongbendo				N/A	N/A	0,00	10,00	10,00	N/A	N/A	0,00	10,00	10,00	N/A	N/A	0,00	10,00	100,00

Berdasarkan hasil interpretasi diatas, capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dapat dikatakan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Interpensi kepentingan politik dalam penyusunan target dan anggaran kegiatan tahunan.
2. Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan ditingkat perangkat daerah.
3. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dibidang perencanaan maupun penganggaran.
4. Kurang optimalnya verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

2.3.1 Permohonan Kartu Keluarga

Grafik 2.1
Realisasi Permohonan Kartu Keluarga
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2021



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik diatas, Permohonan Kartu Keluarga (KK) Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo setiap tahunnya mengalami penurunan, terlihat pada

grafik diatas bahwa permohonan Kartu Keluarga paling banyak pada tahun 2016 sedangkan setahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hingga periode bulan Juli 2021, realisasi Permohonan Kartu Keluarga (KK) mencapai 17.885.

2.3.2 Perekaman dan Pencetakan E-KTP

Kinerja pelayanan bidang Perekaman dan Pencetakan E-KTP di Kecamatan Balongbendo dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Kinerja Pelayanan Kecamatan Balongbendo
Bidang Perekaman dan Pencetakan E-KTP
Tahun 2016-2021



Sesuai dengan data yang ditampilkan dalam grafik diatas, permohonan Pencetakan KTP setiap tahun sejak 2016 hingga Juli 2021 di Kecamatan Balongbendo lebih tinggi daripada permintaan perekamannya. Permintaan tertinggi pencetakan E-KTP Terlihat di tahun 2018 yang mencapai angka 7.203 orang dan terendah berada pada angka 2.082 orang. Sedangkan untuk perekamannya, angka tertinggi sebesar 1.863 orang pada tahun 2016 dan terkecil sejumlah 203 orang pada tahun 2017.

2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balongbendo

Anggaran pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Anggaran dan pendanaan merupakan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah atau perangkat daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dalam anggaran yang cakupannya dikhususkan untuk perencanaan pembangunan terdapat dua komponen anggaran. *Pertama*, pendapatan merupakan komponen anggaran yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer, dll) serta Pendapatan Lain yang Sah. *Kedua*, Belanja merupakan komponen anggaran yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Secara Umum Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Kecamatan Balongbendo diperoleh dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selanjutnya, Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Perkembangan pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dilihat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sebagai berikut.

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Balongbendo
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	11.991.584,00	10.205.178,00	12.772.595,00	12.680.091,00	8.006.082,00	119,92%	102,05%	127,73%	105,67%	100,08%	10.000.000,00	11.131.106,00
BELANJA DAERAH	5.480.137.706,28	4.438.178.196,78	4.502.092.221,00	5.551.424.812,00	5.760.990.248,00	5.169.000.735,00	3.581.987.102,00	4.151.964.423,00	5.152.790.367,00	5.118.838.282,00	94,32%	80,71%	92,22%	92,82%	88,85%	5.146.564.636,81	4.634.916.181,80

Dari data yang ditampilkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo selalu mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran pada setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya menyentuh angka Rp.11.131.106,00. Realisasi Pendapatan paling tinggi terdapat pada tahun 2018 yang mencapai 127,73% atau sejumlah Rp.12.772.595,00 dari total anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp.10.000.000,00. Sementara untuk realisasi pendapatan paling rendah terdapat pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka 100,08% atau sejumlah Rp.8.006.082,00 dari total anggaran yang berjumlah Rp.8.000.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo yang tertinggi berada pada tahun 2016 yang mencapai 94,32% atau sejumlah Rp.5.169.000.735,00 dari total anggaran Rp.5.480.137.706,28.

Adapun Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo paling rendah terdapat pada tahun 2017 yang hanya mencapai angka 80,71% atau sejumlah Rp.3.581.987.102,00 dari total anggaran yang berjumlah Rp.4.438.178.196,78.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balongbendo

Penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Setelah Kecamatan Balongbendo melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa peluang dan tantangan yaitu dapat meliputi penjelasan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kecamatan Balongbendo.

2.4.1 Tantangan (*Threat*)

- a. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dari berbagai kepentingan
- b. Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat
- c. Tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang masih kurang.

2.4.2 Peluang (*Opportunity*)

- a. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

- b. Dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang lebih besar.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik (banyaknya aplikasi yang dibuat oleh SKPD dalam peningkatan pelayanan)

Hasil Analisis terhadap telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029.

Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo.

Urusan penataan ruang dilaksanakan untuk menjamin adanya pemanfaatan lahan yang optimal di masyarakat. Oleh karena itu penyusunan tata ruang wilayah harus dilakukan secara detail dan cermat sehingga setiap wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan: a) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. b) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. c) Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 Pasal 21 ayat 2 menjelaskan Kawasan Wilayah yang berbunyi : Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, Krian, **Balongbendo**, Krembung, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 2019-2039.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Wilayah Perencanaan Perkotaan Balongbendo, meliputi :

- a. Desa Balongbendo;
- b. Desa Singkalan;
- c. Desa Kedungsukodani;
- d. Desa Sumokembangsri;
- e. Desa Seduri;
- f. Desa Wonokupang;
- g. Desa Waruberon;
- h. Desa Bakalanwringinpitu;
- i. Desa Ganggangkepuhsari;
- j. Desa Suwaluh;
- k. Desa Watesari;
- l. Desa Seketi;
- m. Desa Kemangsen;
- n. Desa Jabaran;
- o. Desa Jeruk Legi;
- p. Desa Penambangan;
- q. Desa Wonokarang;

- r. Desa Bakungpringgodani; dan
- s. Desa Bogempinggir

Sedangkan batas-batas Administrasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Balongbendo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik; dan
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, Renstra Kecamatan Balongbendo berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, sebagaimana dalam penyusunannya RPJMD juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Adapun Faktor-faktor penghambat dan pendorong pada Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya SDM Aparatur yang tersedia dalam melayani dan melaksanakan tupoksi;

2. Kurangnya akurasi data sebagai database perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perekonomian, kesejahteraan Sosial dan pembangunan;
3. Kurang tersedianya juknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat;
4. Rendahnya kesadaran sosial dan masih banyaknya pelanggaran;
5. Perbedaan persepsi antara bupati kepada camat maupun desa dalam pelimpahan kewenangan;
6. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penyelenggara kegiatan-kegiatan yang masih belum optimal;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam penunjang pelayanan yang diberikan;
8. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan.

Faktor Pendorong :

1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan yang diberikan;
2. Perkembangan teknologi informasi;
3. Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa yang mendapatkan pembinaan dalam menyusun APBDes dan LPPD sesuai Juknis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongbendo

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pada umumnya merupakan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan. Hal itu bisa diketahui melalui capaian kinerja pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Balongbendo pada 5 tahun sebelumnya. Setelah Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021-2026.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongbendo

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standart yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,50%	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Sarana dan prasarana pelayanan	Pemahaman Masyarakat mengenai SOP dan SPP Pelayanan	Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran baik tingkat kecamatan maupun desa
			Kualitas Sumber Daya Aparatur		Kurangnya perlengkapan penunjang teknis yang berbasis teknologi dalam melakukan pelayanan maupun sosialisasi
			SOP dan SPP Pelayanan	Dukungan dan tindak lanjut dari OPD terkait dalam penerusan pelayanan kependudukan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
			Ketepatan, kejelasan dan		Jumlah dan kapasitaas aparat belum

			kecepatan waktu pelayanan		sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
			Penerapan teknologi informasi		
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	100%		Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memadai	Peran serta dan keaktifan dari aktor terkait	Masih ada aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif
			Intensitas koordinasi dan komunikasi antar aktor terkait		Tingkat koordinasi aparat kewilayahan masih rendah
					Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi
Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%		Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan secara intensif dan rutin	Peran aktif desa dalam pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan pelaporan	Masih belum optimalnya pelaporan kecamatan dan desa mengenai program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
			Kualitas Sumberdaya kecamatan dalam perencanaan dan pelaporan yang berkualitas	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Balongbendo	Perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.
					Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo

Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi urgensi utama dalam memajukan suatu daerah, Kedua hal tersebut kemudian disebut dengan Perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Ahmad Muhdlor, S.I.P.**, dan **H. Subandi, S.H.**, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun

2021- 2026 adalah; **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**.

Adapun pokok-pokok bahasan rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pokok-pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti Kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk Kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya" sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan

		capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo disegala Bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau Pembangunan Berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas dan lugas namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kedepan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan diatas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Visi diatas selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai arah pembangunan lima tahun kedepan. Sedangkan keterkaitan antara visi dan misi akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usah Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa Dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Tabel diatas menjabarkan tentang Visi dan Misi kepala daerah yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo 5 (lima) tahun yang datang untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Selanjutnya, dalam tabel berikut ini akan dipaparkan mengenai permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.4
Analisis Terhadap Visi-Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Sidoarjo

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	a) Kurangnya Pemahaman aparatur tentang pelayanan publik yang baik b) Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang belum memadai c) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis online perlu dibenahi	a) Aparatur yang tidak didukung dengan adanya skill yang memadai b) Kurangnya diklat tentang pelayanan publik untuk aparatur	a) Adanya inovasi yang dibangun dalam memberikan pelayanan publik dengan berbasis Informasi Teknologi (IT) b) Adanya komitmen yang kuat dari para stakeholder untuk mewujudkan pelayanan yang prima c) Peningkatan anggaran sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja Aparatur.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo tahun 2021-2026 ini tidak perlu dilakukan telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Karena Renstra Kecamatan Sodarjo hanya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Wilayah Kecamatan Balongbendo berada kurang lebih 33 km dari Surabaya dan 26 km dari pusat kota Sidoarjo. Batas wilayah Kecamatan Balongbendo pada sisi utara adalah dengan Mojokerto dan Kabupaten Gresik, pada sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon, sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Tarik dan Kabupaten Gresik serta sisi barat berbataaan dengan Kecamatan Krian. Dengan demikian, Kecamatan Balongbendo dapat dikatakan sebagai salah satu kecamatan pinggiran yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Sebagai Kecamatan Pinggiran tentu merupakan potensi bagi Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo untuk melakukan berbagai inovasi, baik dari segi pembangunan, pelayanan publik dan lainnya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo 2009-2029. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;

- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.5
Telaah RTRW Kecamatan Balongbendo

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan
1	2	3	4	5
1	Secara perwilayahan Kecamatan Balongbendo Termasuk kedalam SSWP IV yaitu dengan pusat di Kawasan Krian dan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah	Kawasan permukiman seluas 290,01 Ha	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1. Fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan wilayah kecamatan
2	Kecamatan Balongbendo termasuk pada kawasan Rencana pengembangan jalan kolektor primer serta pengembangan wilayah prioritas yang mendapatkan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih)	Kawasan permukiman perkotaan seluas 1.511,72 Ha		2. Perijinan pembangunan rumah dan fasilitas penunjang (listrik/air bersih) pada kawasan permukiman
3	Kecamatan balongbendo juga termasuk pada kawasan agropolitan tanaman pangan dan hortikultura, relokasi jalur kereta api Sidoarjo-Gununggangsir	Balongbendo memiliki zona wilayah persawahan seluas 1.189,70 dan seluas 438,08		3. Supporting dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Balongbendo perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Balongbendo tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya, perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondii degradasi lingkungan. Sehingga, perencanaan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Berdasarkan telaah tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian RTRW Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1. Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya analisa dan pengawasan Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
- b. Pengembangan potensi lokal yang masih belum optimal
- c. Kesadaran masyarakat maupun pihak terkait dalam menjaga lingkungan maupun menjaga pencemaran lingkungan yang masih kurang.

2. Faktor Pendorong

- a. Peningkatan pengawasan dan kajian Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
- b. Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Aparatur
- c. Koordinasi dan kerjasama antar aktor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- d. Dukungan pendanaan terkait peningkatan sarana dan prasarana penunjang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal. Regional dan nasional. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada pelayanan OPD baik dari *review* hasil kinerja maupun keterkaitan antara sasaran RPJMD dan sasaran OPD serta berdasar pula pada hasil telaah dokumen RTRW.

Selain itu, SKM atau hasil Survei Kepuasan Masyarakat juga menjadi salah satu acuan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan baik, karena didalamnya terdapat kelemahan dan kekuatan unit penyelenggara pelayanan, mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan unit penyelenggara pelayanan, *feedback* dalam memperbaiki pelayanan, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah khususnya Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo. Berikut ini merupakan analisis lingkungan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo:

1. Analisis Lingkungan.

Setelah faktor-faktor lingkungan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diidentifikasi, maka dilakukan analisis terhadap interaksi antara : Kekuatan dan peluang, kekuatan dan ancaman, kelemahan dan peluang, kelemahan dan tantangan. Analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencermatan, pembobotan terhadap masing-masing point dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal mencapai total nilai 100. Selanjutnya untuk tiap-tiap unsur dalam faktor lingkungan tersebut diberi nilai dari angka 1-4 menurut nilai

kepentingan dan pengaruhnya. Nilai 4 = sangat berpengaruh, nilai 3 = berpengaruh, nilai 2 = kurang berpengaruh, dan nilai 1 = tidak berpengaruh. Bobot yang ada dikalikan nilai maka akan diperoleh score. Score inilah yang menentukan urutan prioritas mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Secara rinci, penghitungan analisis lingkungan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Lingkungan Strategis
Kantor Kecamatan Balongbendo

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	NILAI	SCORE	RANKING
Analisis Lingkungan Internal				
A. Kekuatan (<i>Strenght</i>)				
1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan.	20	4	80	I
2. teredianya SOP dan SP dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat	15	4	60	II
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai.	10	3	30	IV
4. Koordinasi pada masing-masing bidang (Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Keamanan dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Bidang Pembangunan	10	4	40	III
B. Kelemahan (<i>Weaknes</i>)				
1. Penguasaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi masih minim.	25	4	100	I
2. Kualitas Aparatur Pemerintah dea yang belum memadai.	10	4	40	III
3. Sumber Daya Manusia Berlatar Belakang IT dan Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan yang masih minim.	15	4	60	II
Analisis Lingkungan Eksternal				
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)				
a. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	25	4	100	I

b. Dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang lebih besar	15	3	45	II
c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik (banyaknya aplikasi yang dibuat oleh SKPD dalam peningkatan pelayanan)	10	4	40	III
D. Tantangan (<i>Threats</i>)				
a. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dari berbagai kepentingan	10	3	30	III
b. Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat	15	4	60	II
c. Tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang masih kurang	25	4	100	I

2. Issue Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- Dengan adanya Peraturan Bupati tentang rincian tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersedianya dukungan Anggaran dari APBD serta adanya sarana prasarana yang memadai maka optimis untuk dapat mengatasi masalah yang ada di Wilayah Kecamatan Balongbendo;
- Optimasi sumber daya yang ada (tenaga/personil, dana dan sarana prasarana) serta adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait maka dapat untuk mengatasi rendahnya kualitas SDMnya serta meningkatkan pengetahuannya;
- Diharapkan dengan beban permasalahan di Wilayah Kecamatan Balongbendo ada tambahan anggaran agar dalam menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan dapat secara optimal;
- Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, maka diharapkan untuk diadakan Sarpras pendukungnya;

- e. Dengan adanya kekeluargaan yang kuat antar karyawan, maka optimis untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Balongbendo.
- f. Masih kurangnya kualitas pelayanan Kecamatan Balongbendo hal ini diketahui melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang masih memperoleh nilai 7,71 di tahun 2016.
- g. Masih minimnya desa swakarya di Kecamatan Balongbendo. Saat ini Kecamatan Balongbendo memiliki 23 desa yang kesemuanya adalah desa swasembada.

3. Rumusan Perubahan

Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI OPD Dengan adanya analisis lingkungan dan isu strategis tersebut diatas, maka Kecamatan Balongbendo optimis untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang ada, apabila ada perubahan yang sangat berpengaruh sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan secara internal tentang pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Tertib administrasi kependudukan dengan SIAK online dan dukungan personil yang memadai dan berdedikasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balongbendo

Kata Tujuan bermakna sebagai arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan. Tujuan merupakan sebuah target untuk dicapai dikemudian hari dengan waktu yang juga telah ditargetkan yang akan dicapai.

sasaran adalah penjabaran dari sebuah tujuan, mengenai tentang apa yang akan menjadi hal yang dicapai atau akan dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Perumusan sasaran suatu instansi atau organisasi harus spesifik dan sistematis, juga terukur, dan mempunyai kriteria yang jelas, mempunyai indikator yang dengan rinci sehingga dapat tercapai dengan cara efektif dan juga efisien.

Selanjutnya, Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Sasaran Strategis Kabupaten Sidoarjo "*Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata*" Kecamatan Balongbendo menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Balongbendo yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan. pemerintahan desa;

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Balongbendo

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85,1	85,50	85,75	86,00	86,50	87,00
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan Balongbendo	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	85,1	85,50	85,75	86,00	86,50	87,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini mengemukakan rumusan strategi Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang menjadi acuan bagaimana tujuan dan sasaran akan tercapai, yang kemudian diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu terkait upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo, strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balongbendo

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan					
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Nilai SAKIP Kecamatan Balongbendo Kecamatan 1. Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	1. Peningkatan Manajemen pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pemerintahan teknologi infomai 2. Peningkatan sarana prasarana Aparatur sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi OPD dalam memberikan pelayanan prima 3. penguatan kapasitas aparatur	1. Menjamin terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan standar pelayanan. 2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan potensi kinerja dan disiplin	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

			dan optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan lembaga yang akuntabel	aparatur melalui pembinaan serta pelatihan	
			4. Peningkatan sistem pengkordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan serta pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	4. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 5. Meningkatkan kualitas pola koordinasi, melalui pembinaan dan pengawasan terhadap bidang-bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemerintahan desa	

Pada tabel diatas, strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo pada tiap tahun berkenaan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan atau target tertentu guna memakai atau untuk memperoleh alokasi anggaran. Program juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah/lembaga. Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan Kecamatan Balongbendo merupakan instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun program dan kegiatan yang ditetapkan Kecamatan Balongbendo dapat dilihat dari tabel berikut :

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	a. Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan Kesekretariatan	83,00%	90,50 %	5.066.52 1.716,00	91,00 %	6.241.17 4.396,00	91,50%	7.132.11 5.398,00	92,00%	7.288.36 2.798,00	92,50 %	10.145.4 06.053,0 0	92,50 %	10.145.4 06.053,0 0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	3 Kali	2 Kali	0,00	4 Kali	0,00	4 Kali	0,00	4 Kali	0,00	4 Kali	90.000.0 00,00	4 Kali	90.000.0 00,00		
				b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	3 Dokumen	90.000.000 ,00	3 Dokumen	90.000.000 ,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00		
			Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00		

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

	Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang disusun tepat waktu		n		n					n		n			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	83%	84%	3.675.793.950,00	85%	4.043.373.345,00	86%	4.852.048.014,00	87%	4.852.048.014,00	88%	7.278.072.021,00	88%	7.278.072.021,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	29 Orang	29 Orang	3.675.793.950,00	30 Orang	4.043.373.345,00	30 Orang	4.852.048.014,00	30 Orang	4.852.048.014,00	30 Orang	7.278.072.021,00	30 Orang	7.278.072.021,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	214 Buah	300 Buah	0,00	300 Buah	0,00	300 Buah	0,00	300 Buah	0,00	300 Buah	0,00	300 Buah	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	85,5	369.932.566,00	86	441.705.851,00	86,5	465.683.144,00	87	474.238.544,00	87,5	474.238.544,00	88	474.238.544,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	94 Buah	107 Buah	4.832.080,00	120 Buah	7.248.120,00	120 Buah	8.697.744,00	120 Buah	10.872.180,00	120 Buah	10.872.180,00	120 Buah	10.872.180,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	57 Buah	1160 Buah	27.001.428,00	1200 Buah	40.502.142,00	1200 Buah	40.502.142,00	1200 Buah	40.502.142,00	1200 Buah	40.502.142,00	1200 Buah	40.502.142,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah peralatan rumah tangga yang	0 Jenis	13 Jenis	12.400.740,00	15 Jenis	20.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

	Tangga	tersedia															
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan	6666 Liter	6000 Liter		6000 Liter		6000 Liter		6000 Liter		6000 Liter		6000 Liter			
		2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	4800 Liter	8200 Liter	133.800.00 0,00	8200 Liter	133.800.00 0,00	8200 Liter	133.800.00 0,00	8200 Liter	133.800.00 0,00	8200 Liter	133.800.00 0,00	8200 Liter	133.800.00 0,00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	20.326.000 ,00	2 Jenis	24.391.200 ,00	2 Jenis	29.269.440 ,00	2 Jenis	35.123.328 ,00	2 Jenis	35.123.328 ,00	2 Jenis	35.123.328 ,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	4.356.000 ,00	2 Jenis	4.791.600 ,00	2 Jenis	5.270.760 ,00	2 Jenis	5.797.836 ,00	2 Jenis	5.797.836 ,00	2 Jenis	5.797.836 ,00		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	17 Jenis	22 Jenis	26.180.066 ,00	30 Jenis	39.270.099 ,00	22 Jenis	39.270.099 ,00	22 Jenis	39.270.099 ,00	22 Jenis	39.270.099 ,00	22 Jenis	39.270.099 ,00		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1200 Kotak	1200 Kotak	30.617.500 ,00	1200 Kotak	33.679.250 ,00	1200 Kotak	37.047.175 ,00	1200 Kotak	37.047.175 ,00	1200 Kotak	37.047.175 ,00	1200 Kotak	37.047.175 ,00		
		b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	b. 0 kali	b. 0 kali	110.418.75 2,00	b. 0 kali	138.023.44 0,00	b. 0 kali	151.825.78 4,00	b. 0 kali	151.825.78 4,00	b. 0 kali	151.825.78 4,00	b. 0 kali	151.825.78 4,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	16 Unit, 2 Jenis	0 Unit, 0 Jenis	0,00	40 Unit, 2 Jenis	400.000.000,00	40 Unit, 2 Jenis	500.000.000,00	40 Unit, 2 Jenis	625.000.000,00	40 Unit, 2 Jenis	781.250.000,00	40 Unit, 2 Jenis	781.250.000,00		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	8 Unit	0 Unit	0,00	20 Unit	150.000.00 0,00	20 Unit	187.500.00 0,00	20 Unit	234.375.00 0,00	20 Unit	292.968.75 0,00	20 Unit	292.968.75 0,00		
	Pengadaan	Jumlah peralatan	8 Unit	0 Unit	0,00	20 Unit	250.000.00	20 Unit	312.500.00	20 Unit	390.625.00	20 Unit	488.281.25	20 Unit	488.281.25		

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

	Peralatan dan Mesin Lainnya	dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	847.795.200,00	100%	847.795.200,00	100%	1.000.924.240,00	100%	1.000.924.240,00	100%	1.164.963.088,00	100%	1.164.963.088,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	164.300.000,00	12 bulan	164.300.000,00	12 bulan	180.730.000,00	12 bulan	180.730.000,00	12 bulan	180.730.000,00	12 bulan	180.730.000,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	3 Orang	3 Orang	683.495.200,00	3 Orang	683.495.200,00	3 Orang	820.194.240,00	3 Orang	820.194.240,00	3 Orang	984.233.088,00	3 Orang	984.233.088,00		
		2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	0 Orang	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang			
		3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	14 Orang	15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang			
		4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	11 Orang	11 Orang		11 Orang		11 Orang		11 Orang		11 Orang		11 Orang			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	40 Unit	37 Unit	173.000.000,00	47 Unit	420.000.000,00	47 Unit	210.000.000,00	47 Unit	215.000.000,00	47 Unit	215.000.000,00	47 Unit	215.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	2 unit	2 unit	17.500.000,00	2 unit	20.000.000,00	2 unit	20.000.000,00	2 unit	20.000.000,00	2 unit	20.000.000,00	2 unit	20.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;	4 Unit	4 Unit	28.500.000,00	4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00		
		2. Jumlah bahan peralatan dan	0 Buah	0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah			

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bahan pembersih kendaraan yang tersedia															
		3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	4 Unit	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	30 Unit	15.000.000,00	40 Unit	20.000.000,00	40 Unit	20.000.000,00	40 Unit	25.000.000,00	40 Unit	25.000.000,00	40 Unit	25.000.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ruang dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	96 M2	90 M2	112.000.000,00	150 M2	360.000.000,00	100 M2	150.000.000,00	100 M2	150.000.000,00	100 M2	150.000.000,00	100 M2	150.000.000,00		
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin	100%	100%	0,00	100%	88.300.000,00	100%	103.460.000,00	100%	121.152.000,00	100%	141.882.400,00	100%	141.882.400,00		
		2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	0%	0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	29 Orang	0 Orang	0,00	30 Orang	63.300.000,00	30 Orang	75.960.000,00	30 Orang	91.152.000,00	30 Orang	109.382.400,00	30 Orang	109.382.400,00		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	1 Buah	0 Buah	0,00	50 Buah	25.000.000,00	50 Buah	27.500.000,00	50 Buah	30.000.000,00	50 Buah	32.500.000,00	50 Buah	32.500.000,00		
	2. PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	100%	1.489.850.000,00	100%	2.117.625.000,00	100%	2.777.060.000,00	100%	3.689.377.000,00	100%	4.418.056.400,00	100%	4.418.056.400,00		
		b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

			ekonomi masyarakat, dan PKL															
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	4900 Berkas	4900 Berkas	43.312.500,00	4900 Berkas	51.975.000,00	4900 Berkas	62.370.000,00	4900 Berkas	74.844.000,00	4900 Berkas	89.812.800,00	4900 Berkas	89.812.800,00		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima	5000 Berkas	5000 Berkas	43.312.500,00	5000 Berkas	51.975.000,00	5000 Berkas	62.370.000,00	5000 Berkas	74.844.000,00	5000 Berkas	89.812.800,00	5000 Berkas	89.812.800,00		
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	40 Orang	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	13 Laporan	13 Laporan	405.850.000,00	24 Laporan	811.700.000,00	24 Laporan	1.217.550.000,00	24 Laporan	1.826.325.000,00	24 Laporan	2.191.590.000,00	24 Laporan	2.191.590.000,00		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	7 Kegiatan	405.850.000,00	6 Kegiatan	811.700.000,00	6 Kegiatan	1.217.550.000,00	6 Kegiatan	1.826.325.000,00	6 Kegiatan	2.191.590.000,00	6 Kegiatan	2.191.590.000,00		
			b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan			
			c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	4 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan			
			d. Jumlah rapat	0 Kegiatan	0		3		3		3		3		3			

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

			koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan			
			1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang Diterbitkan	12 Berkas	12 Berkas		12 Berkas		12 Berkas		12 Berkas		12 Berkas		12 Berkas			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dillimpahkan kepada Camat	2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup ; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	16 Laporan	16 Laporan	1.040.687.500,00	16 Laporan	1.253.950.000,00	16 Laporan	1.497.140.000,00	16 Laporan	1.788.208.000,00	16 Laporan	2.136.653.600,00	16 Laporan	2.136.653.600,00		
			3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	0 Laporan	14 Laporan		14 Laporan		14 Laporan		14 Laporan		16 Laporan		16 Laporan			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	15 Berkas	15 Berkas	5.675.000,00	15 Berkas	6.810.000,00	15 Berkas	8.172.000,00	15 Berkas	9.806.400,00	15 Berkas	11.767.680,00	15 Berkas	11.767.680,00		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan			
			b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	59.062.500,00	4 Kegiatan	76.000.000,00	4 Kegiatan	83.600.000,00	4 Kegiatan	91.960.000,00	4 Kegiatan	101.156.000,00	4 Kegiatan	101.156.000,00		
			c. Jumlah monev bidang pemerintahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan			
			d. Jumlah monev bidang	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan			

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

			perekonomian															
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan	0 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		2 Kegiatan			
			b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan	0 Kegiatan	10 Kegiatan	975.950.00 0,00	10 Kegiatan	1.171.140. 000,00	10 Kegiatan	1.405.368. 000,00	10 Kegiatan	1.686.441. 600,00	10 Kegiatan	2.023.729. 920,00	2 Kegiatan	2.023.729. 920,00		
			c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan			
		3. PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	37.824.1 64,00	100%	168.947. 492,00	100%	218.933. 115,00	100%	188.721. 738,00	100%	190.573. 038,00	100%	190.573. 038,00		
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan		1 Kegiatan	37.824.1 64,00	5 Kegiatan	168.947. 492,00	5 Kegiatan	218.933. 115,00	5 Kegiatan	188.721. 738,00	5 Kegiatan	190.573. 038,00	5 Kegiatan	190.573. 038,00		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan			
		Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	b. Jumlah lomba- lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	0 Kegiatan	0 Kegiatan	37.824.164 ,00		113.472.49 2,00		141.840.61 5,00		170.208.73 8,00		170.208.73 8,00		170.208.73 8,00		

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimka yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	15.300.000,00	2 Kegiatan	16.830.000,00	2 Kegiatan	18.513.000,00	2 Kegiatan	20.364.300,00	2 Kegiatan	20.364.300,00		
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres	0 Desa	0 Desa	0,00	20 Desa	40.175.000,00	20 Desa	60.262.500,00	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00		
		4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	37.850.000,00	100%	79.475.000,00	100%	87.422.500,00	100%	96.164.750,00	100%	105.781.225,00	100%	105.781.225,00		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	20 Desa	20 Desa	37.850.000,00	20 Desa	79.475.000,00	20 Desa	87.422.500,00	20 Desa	96.164.750,00	20 Desa	105.781.225,00	20 Desa	105.781.225,00		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi	20 Desa	20 Desa	17.100.000,00	20 Desa	38.600.000,00	20 Desa	42.460.000,00	20 Desa	46.706.000,00	20 Desa	51.376.600,00	20 Desa	51.376.600,00		
			b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	20 Desa	20 Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa		20 Desa			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.750.000,00	3 Kegiatan	40.875.000,00	3 Kegiatan	44.962.500,00	3 Kegiatan	49.458.750,00	3 Kegiatan	54.404.625,00	3 Kegiatan	54.404.625,00		
	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	47.000.000,00	100%	273.350.000,00	100%	325.165.000,00	100%	357.681.500,00	100%	393.449.650,00	100%	393.449.650,00		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan	2 Kegiatan	3 Laporan	19.575.000,00	6 Laporan	104.850.000,00	6 Laporan	139.815.000,00	6 Laporan	153.796.500,00	6 Laporan	169.176.150,00	6 Laporan	169.176.150,00		

RENSTRA

KECAMATAN BALONGBENDO

TAHUN 2021- 2026

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun															
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	61.200.000 ,00	2 Kegiatan	91.800.000 ,00	2 Kegiatan	100.980.00 0,00	2 Kegiatan	111.078.00 0,00	2 Kegiatan	111.078.00 0,00		
		Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan				
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	19.575.000 ,00	3 Kegiatan	43.650.000 ,00	3 Kegiatan	48.015.000 ,00	3 Kegiatan	52.816.500 ,00	3 Kegiatan	58.098.150 ,00	3 Kegiatan	58.098.150 ,00		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	1 Permasalahan	6 Permasalahan	27.425.000,00	6 Permasalahan	168.500.000,00	6 Permasalahan	185.350.000,00	6 Permasalahan	203.885.000,00	6 Permasalahan	224.273.500,00	6 Permasalahan	224.273.500,00		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 Kegiatan	12 Kegiatan	27.425.000 ,00	12 Kegiatan	168.500.00 0,00	12 Kegiatan	185.350.00 0,00	12 Kegiatan	203.885.00 0,00	12 Kegiatan	224.273.50 0,00	12 Kegiatan	224.273.50 0,00		
		Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar	1 Permasalahan	6 Permasalahan		6 Permasalahan		6 Permasalahan		6 Permasalahan		6 Permasalahan		6 Permasalahan			
			c. Jumlah movev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Balongbendo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 sebagai aktualisasi dan komitmen Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo dalam mendukung tercapainya target, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo 5 tahun kedepan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONGBENDO								
1	Nilai SKM Kecamatan	82 (BB)	85,50 (BB)	85,75 (BB)	86 (BB)	86,50 (BB)	87 (BB)	87 (BB)
INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONGBENDO								
1	Nilai SAKIP Kecamatan Balongbendo	72 (BB)	72 (BB)	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)
2	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Balongbendo Yang Menacu
Pada RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan Kesekretariatan	83,00%	5.066.521.716,00	6.241.174.396,00	7.132.115.398,00	7.288.362.798,00	10.145.406.053,00	92,50%
2	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100%	1.489.850.000,00	2.117.625.000,00	2.777.060.000,00	3.689.377.000,00	4.418.056.400,00	100%
	b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%						100%
	c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100%						100%
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	37.824.164,00	168.947.492,00	218.933.115,00	188.721.738,00	190.573.038,00	100%
4	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	37.850.000,00	79.475.000,00	87.422.500,00	96.164.750,00	105.781.225,00	100%
5	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	47.000.000,00	273.350.000,00	325.165.000,00	357.681.500,00	393.449.650,00	100%

BAB VIII

PENUTUP

Kecamatan Balongbendo sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentunya memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* dan *clean Government*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan berprinsip pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik serta tata kelola pemerintahan Daerah yang bersih kemudian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan Kecamatan Balongbendo.

Renstra Kecamatan Balongbendo ini merupakan penjabaran dari visi-misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan melalui rencana program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan atau sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Renstra Kecamatan Balongbendo tahun 2021-2026 ini tentunya masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti

terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan dilapangan serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian, semoga Renstra ini bisa direalisasikan dengan baik untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya digunakan demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

NIP. 19790114 199711 1 001